

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 AKUNTANSI AKTIVA TETAP

2.1.1 Pengertian Aktiva Tetap

Menurut Al Haryono Jusup (2012:28) aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan menurut Donald E. Keiso yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Emil Salim (2008: 219), menyatakan bahwa aktiva tetap adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan, atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Selain itu, menurut Mulyadi (2001: 535), aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan tidak diniatkan untuk dijual. Adapula menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 (2010: 4), menyatakan bahwa aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan kegiatan pemerintahan serta dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2.1.2 Klasifikasi Aktiva Tetap

Menurut Al Haryono Jusup (2011: 135), aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Tanah

Tanah meliputi tanah yang digunakan sebagai tempat untuk berdirinya gedung-gedung perusahaan dan fasilitas lainnya.

2. Perbaikan Tanah

Perbaikan tanah dimaksudkan seperti jalan-jalan yang berada disepertar lokasi perusahaan berdiri, tempat parkir, pagar dan saluran air bawah tanah.

3. Gedung

Gedung digunakan untuk kantor, toko, pabrik dan gudang, serta bangunan gedung lainnya.

4. Peralatan

Peralatan seperti peralatan kantor, mesin pabrik, peralatan pabrik, dan kendaraan serta mebel.

Selain itu, Menurut Harahap (2007:22), klasifikasi aktiva tetap dapat dikelompokkan berdasarkan kategori, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam sudut substansi, aktiva dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Aktiva tetap berwujud, yaitu aktiva yang memiliki wujud fisik serta perolehannya dalam bentuk siap untuk dipakai. Seperti lahan, mesin, gedung, dan peralatan.
- b. Aktiva tetap tak berwujud, yaitu aktiva yang memiliki wujud fisik serta keberadaannya istimewa untuk menghasilkan pendapatan. Seperti hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain-lain.

2. Dalam penyusutan, aktiva juga terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Disusutkan, artinya aktiva yang berkaitan memiliki masa manfaat serta pengurangan kinerja setiap tahunnya. Contohnya adalah mesin operasional perusahaan, karena pada umumnya setiap tahun mesin yang digunakan performa kinerjanya akan berkurang seiring berjalannya waktu kinerja.
 - b. Tidak disusutkan, artinya aktiva ini tidak memiliki performa kinerja pada operasional perusahaan. Contohnya adalah tanah, meskipun tanah merupakan aktiva tetap. Namun, ada kondisi yang khusus untuk tanah harus disusutkan, yaitu apabila : 1) kondisi tanah sudah tidak layak untuk operasional, 2) aktiva tanah atau bangunan terletak di daerah terpencil atau 3) perkiraan perpanjangan hak atas tanah kemungkinan besar tidak diperoleh.
3. Dalam jenisnya, aktiva tetap terdiri dari beberapa jenis antara lain:
 - a. Lahan

Lahan adalah bidang tanah yang terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, pencatatannya harus dipisahkan antara lahan dan bangunan. Khusus untuk bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan tersebut atau yang dapat meningkatkan nilai gunanya, seperti jalan, maka dapat digabungkan dalam nilai lahan.
 - b. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung adalah bangunan yang berdiri di atasbumi, baik di ataslahan maupun di atasair. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu.

c. Mesin

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan.

d. Kendaraan

Seluruh jenis kendaraan seperti alat pengangkut, mobil, truk, sepeda motor, dan lain-lain.

e. Perabot

Dalam hal ini termasuk perabot kantor, perabot pabrik, atau yang merupakan isi dari suatu bangunan.

f. Inventaris atau Peralatan

Peralatan yang dianggap alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris, pabrik, dan lain-lain.

g. Prasarana

Prasarana terdiri dari jembatan, pagar, dan lain-lain.

2.1.3 Pengakuan Aktiva Tetap

Menurut Suwardjono (2014: 287), suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Pada umumnya, pengakuan atas aset ini dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian atau keadaan tersebut. Disamping memenuhi definisi aset, kriteria, keteraturan, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Adapula menurut Sterling, Belkaoui (1993,

dalam Suwardjono (2014: 287)) menunjukkan kondisi perlu dan cukup yang merupakan pengujian yang cukup rinci untuk mengakui aset tetap antara lain:

a. Deteksi adanya aset (*detection of existence test*).

Untuk pengakuan aset, diharuskan adanya transaksi yang menandai timbulnya aset.

b. Sumber ekonomik dan kewajiban (*economic resources and obligation test*).

Untuk mengakui adanya aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomik yang langka, dibutuhkan, serta berharga.

c. Berkaitan dengan entitas (*entity association test*).

Untuk mengakui aset, kesatuan usaha diharuskan mengendalikan atau menguasai objek aset.

d. Mengandung nilai (*non-zero magnitude test*).

Untuk mengakui aset, suatu objek diharuskan memiliki manfaat yang terukur secara moneter.

e. Berkaitan dengan waktu pelaporan (*temporal association test*).

Untuk mengakui aset, semua pengujian-pengujian harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca.

f. Verifikasi (*verification test*).

Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakini bahwa kelima pengujian-pengujian telah terpenuhi.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) No.07 (2010: 15), untuk dapat diakui sebagai aktiva tetap, suatu aktiva tetap harus memiliki kriteria: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (2) biaya perolehan aktiva dapat

diukur secara handal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta (4) diperoleh dan dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.1.4 Pengukuran Aktiva Tetap

Menurut Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 (2010: 20), Aktiva tetap diukur dari nilai perolehannya. Nilai perolehan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk memperoleh aktiva tetap, dimulai pada saat pembelian aktiva tetap tersebut hingga biaya-biaya yang muncul pada saat pengoprasian aktiva tetap tersebut.

Pengakuan aktiva tetap dapat diandalkan jika terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aktiva tetap yang mengidentifikasi biayanya. Jika aset dibangun sendiri, keandalan biaya diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan untuk proses konstruksi.

2.1.5 Pengungkapan Aktiva Tetap

Menurut Suwardjono (2014: 300), bila sebagian atau seluruh bunga dikapitalisasi tentu saja akan ada sebagian informasi bunga yang hilang. Oleh karena itu, perlunya pengungkapan tentang hal ini sehingga statemen keuangan tidak menyesatkan. Standar akuntansi kapitalisasi bunga juga menentukan informasi tambahan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. agar statemen keuangan tetap informatif, berikut ini beberapa hal yang perlu diungkapkan guna sebagai penjabar statemen keuangan:

- a. Jika tidak ada kos bunga yang dikapitalisasi, maka total bunga yang terjadi selama perioda akan dibebankan sebagai biaya perioda tersebut.
- b. Jika sebagian kos bunga dikapitalisasi, maka bunga total yang terjadi dan sebagian yang dikapitalisasi.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 (2010: 80), laporan keuangan diharuskan untuk mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat untuk awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aset, pelepasan aset, akumulasi aset jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

2.1.6 Penyusutan

Menurut Haryono Jusup (2011: 144), Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Pengalokasian biaya perolehan ini diperlukan guna dapat dilakukannya penandingan yang tepat atas pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip penandingan.

Penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya perolehan bukan pe nilaiian atas aset. Pengakuan atas penyusutan pada aset tetap tidak berakibat adanya pengumpulan kas untuk mengganti aset lama dengan aset yang baru. Ada 3 faktor yang berpengaruh dalam perhitungan penyusutan, yaitu:

1. Biaya Perolehan

Aset tetap akan diperlakukan sesuai dengan prinsip akuntansi dimana aset tetap tersebut akan dicatat sebesar biaya perolehannya.

2. Masa Manfaat

Masa manfaat merupakan jangka waktu pemakaian aset tetap yang diharapkan oleh perusahaan didasari dengan prinsip akuntansi.

3. Nilai Residu

Nilai residu merupakan nilai sisa atau taksiran nilai tunai aset pada akhir masa manfaat aset tersebut. Nilai ini didasarkan pada taksiran nilai aset sebagai barang bekas, atau bisa juga atas dasar taksiran.

Dalam penyusutan, terdapat metoda-metoda perhitungan, antara lain sebagai berikut:

1. Metoda Garis Lurus

Dalam metoda garis lurus, beban penyusutan periodik sepanjang masa pemakaian aset adalah sama besarnya. Untuk menghitung biaya penyusutannya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu} = \text{Biaya Perolehan Penyusutan}$$

$$\text{Beban Penyusutan per Tahun} = \frac{\text{Biaya Perolehan Penyusutan}}{\text{Masa Manfaat (dalam tahun)}}$$

2. Metoda Saldo Menurun

Metode Saldo menurun menghasilkan biaya penyusutan yang menurun dari tahun ke tahun, hal ini terjadi karena perhitungan biaya penyusutan periodik didasarkan pada nilai buku yang memang seharusnya menurun dari tahun ke tahun. Beban penyusutan akan dihitung dengan rumus :

Beban Penyusutan

$$= \text{Nilai Buku pada Awal Tahun} \times \text{Tarif Saldo Menurun}$$

3. Metoda Satuan Hasil

Pada metode ini perhitungan penyusutan aset tetap pada suatu periode akuntansi berdasarkan berapa banyak produk yang di hasilkan pada periode penggunaan aset tetap tersebut. Formula untuk menghitung penyusutannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Beban Penyusutan Per Satuan Hasil} = \frac{\text{Biaya Perolehan Disusutkan}}{\text{Total Hasil Satuan}}$$

Penggunaan metode harus dapat mencerminkan manfaat ekonomik serta kemungkinan jasa yang akan diperuntukkan ke pemerintah. Jumlah nilai penyusutan dalam setiap periode akan dicatat dalam akumulasi penyusutan dengan kredit penginventasian dalam aset tetap dan disajikan sebagai pengurang akun aktiva tetap.

Dalam pencatatan penyusutanpun tidak terlepas dari permasalahan, diantaranya yaitu mengenai penentuan jenis aktiva tetap yang akan disusutkan, metode penyusutan yang digunakan, penentuan masa manfaat ekonomik aktiva tetap terkait, serta berapa jumlah yang dapat disusutkan.

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 (2010: 53), menyatakan bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai pada setiap penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat pada setiap aset tetap

yang disusutkan harus ditinjau secara periodik, jika dalam masa peninjauan terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan sekarang dan penyusutan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

2.2 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009: 2) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai alat informasi yang baik dalam pemerintahan yaitu sebagai alat manajemen maupun sebagai alat informasi bagi publik. Menurutnya, akuntansi sektor publikpun memiliki fungsi utama diantaranya adalah sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat politik, alat kebijakan fiskal, alat penilai kinerja, alat menciptakan ruang publik serta sebagai alat komunikasi dan informasi.

Sedangkan menurut Abdul Halim Akuntansi (2002: 143), Pemerintahan merupakan sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Dari beberapa definisi mengenai akuntansi pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa, akuntansi pemerintahan adalah segala pencatatan atau seluruh informasi mengenai keuangan di pemerintahan yang dimaksudkan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan dalam instansi.

Akuntansi sektor publik pun terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi lembaga pendidikan, serta akuntansi organisasi nirlaba yang pendiriannya diperuntukkan untuk kepentingan publik serta bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pemerintahan. Penerapan akuntansi sektor publik dalam pemerintahan sangat dibutuhkan dalam era globalisasi seperti sekarang ini, pun karena tuntutan transparansi mengenai akuntansi dari masyarakat.

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 71 (2010: 2), mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan serta elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintahan terkait.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 7 (2010), mengatur mengenai akuntansi aktiva tetap dengan memberikan pedoman bagi pemerintahan mengenai perlakuan akuntansi aktiva tetap yang dimulai dari pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan aktiva tetap yang didasari pada peristiwa yang terjadi. Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) pun digunakan sebagai prasyarat yang memiliki nilai hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan bagi pemerintahan.

